



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

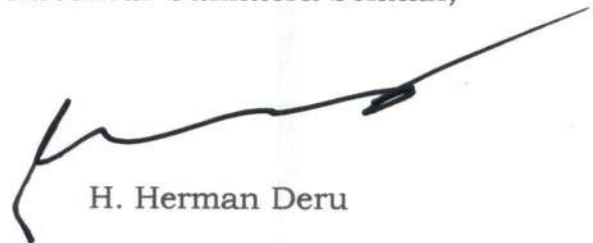
Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 21 Januari 2026

Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,5475
		1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,95
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	2.1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	%	13,8
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3.1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,453
4.	Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah	4.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 6,3
		4.2	PDRB per Kapita	Rp (Juta)	94,00
		4.3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50
5.	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	5.1	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
6.	Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air	6.1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,63
		6.2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	21,99
7.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan	7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,44
		7.2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	65,48-68,68
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	8.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,79
9.	Meningkatnya Pengelolaan Bencana	9.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	129,78
10.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,07-10,07
		10.2	Rasio Gini	Indeks	0,312-0,316
11.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Berusaha	11.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75-3,90
12.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	12.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76-77)

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.228.400.000	APBD
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp	145.955.759.612	APBD
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	793.299.136	APBD
4	Hubungan Industrial	Rp	110.000.000	APBD
5	Kawasan Permukiman	Rp	5.251.928.660	APBD
6	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	478.000.000	APBD
7	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	2.575.000.000	APBD
8	Kepegawaian Daerah	Rp	968.480.000	APBD
9	Kesejahteraan Rakyat	Rp	25.597.840.900	APBD
10	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp	95.000.000	APBD
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	978.174.781	APBD
12	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	306.000.000	APBD
13	Pelayanan Penanaman Modal	Rp	474.750.449	APBD
14	Pelayanan Penghubung	Rp	236.200.000	APBD
15	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	100.000.000	APBD
16	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp	180.000.000	APBD
17	Pemasaran Pariwisata	Rp	1.777.320.000	APBD
18	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	448.000.000	APBD
19	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	169.300.000	APBD
20	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	40.000.000	APBD
21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	3.876.800.000	APBD
22	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	785.000.000	APBD
23	Pemberdayaan Sosial	Rp	300.000.000	APBD
24	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	100.000.000	APBD
25	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	200.000.000	APBD
26	Pembinaan Perpustakaan	Rp	918.041.202	APBD
27	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	225.000.000	APBD
28	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	430.488.015.220	APBD
29	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	77.818.258.363	APBD
30	Penanganan Bencana	Rp	709.000.000	APBD
31	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	175.000.000	APBD
32	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	90.000.000	APBD
33	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	35.000.000	APBD
34	Penanggulangan Bencana	Rp	4.466.753.450	APBD
35	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	559.954.530	APBD
36	Penataan Bangunan Gedung	Rp	3.083.492.567	APBD
37	Penataan Desa	Rp	50.000.000	APBD
38	Penataan Organisasi	Rp	379.417.840	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
39	Penatagunaan Tanah	Rp	30.000.000	APBD
40	Pencatatan Sipil	Rp	40.000.000	APBD
41	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	360.857.500	APBD
42	Pendaftaran Penduduk	Rp	40.000.000	APBD
43	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	103.537.300	APBD
44	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	40.000.000	APBD
45	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp	3.040.000.000	APBD
46	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	867.040.000	APBD
47	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			APBD
48	Penempatan Tenaga Kerja	Rp	198.000.000	APBD
49	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp	110.000.000	APBD
50	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	1.290.000.000	APBD
51	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	80.000.000	APBD
52	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	116.000.000	APBD
53	Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp	320.000.000	APBD
54	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	135.000.000	APBD
55	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	5.976.000.000	APBD
56	Pengelolaan Arsip	Rp	258.000.000	APBD
57	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	20.000.000	APBD
58	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	2.459.000.000	APBD
59	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp	40.000.000	APBD
60	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	994.098.865	APBD
61	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	818.536.934	APBD
62	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	96.000.000	APBD
63	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp	100.000.000	APBD
64	Pengelolaan Hutan	Rp	1.972.000.000	APBD
65	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	80.000.000	APBD
66	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	6.454.988.922	APBD
67	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	45.000.000	APBD
68	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	158.000.000	APBD
69	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	757.400.000	APBD
70	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	3.305.340.683.868	APBD
71	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	120.800.000	APBD
72	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	232.200.000	APBD
73	Pengelolaan Pelayaran	Rp	1.467.290.000	APBD
74	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	5.972.583.920	APBD
75	Pengelolaan Pendidikan	Rp	897.419.967.954	APBD
76	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.305.000.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
77	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	745.000.000	APBD
78	Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	192.618.600	APBD
79	Pengelolaan Permuseuman	Rp	2.898.670.960	APBD
80	Pengelolaan Persampahan	Rp	150.000.000	APBD
81	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	30.000.000	APBD
82	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	100.000.000	APBD
83	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	50.000.000	APBD
84	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	32.539.009.869	APBD
85	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	284.000.000	APBD
86	Pengelolaan Tanah Kosong	Rp	60.000.000	APBD
87	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp	22.493.704.881	APBD
88	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	186.800.000	APBD
89	Pengembangan Ekspor	Rp	54.000.000	APBD
90	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	374.000.000	APBD
91	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	1.429.318.445	APBD
92	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	3.476.950.000	APBD
93	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	2.574.000.000	APBD
94	Pengembangan Kebudayaan	Rp	2.833.800.000	APBD
95	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	73.400.000	APBD
96	Pengembangan Kurikulum	Rp	119.450.000	APBD
97	Pengembangan Permukiman	Rp	2.584.661.707	APBD
98	Pengembangan Perumahan	Rp	1.304.740.000	APBD
99	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	924.668.773	APBD
100	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	141.584.315	APBD
101	Pengembangan Umkm	Rp	900.000.000	APBD
102	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	20.000.000	APBD
103	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	714.945.539	APBD
104	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	45.018.218	APBD
105	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	230.000.000	APBD
106	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	533.241.248	APBD
107	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.066.000.000	APBD
108	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	50.000.000	APBD
109	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	270.000.000	APBD
110	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	650.500.000	APBD
111	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	4.500.000.000	APBD
112	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	318.920.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
113	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	288.000.000	APBD
114	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	12.185.774.000	APBD
115	Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	600.000.000	APBD
116	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	1.383.055.000	APBD
117	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	450.300.000	APBD
118	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	60.000.000	APBD
119	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	116.000.000	APBD
120	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	72.000.000	APBD
121	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	14.667.147.564	APBD
122	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	17.175.304.024	APBD
123	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	600.000.000	APBD
124	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	4.117.978.500.712	APBD
125	Penyelenggaraan Jalan	Rp	503.414.046.815	APBD
126	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	6.835.384.495	APBD
127	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	2.432.000.000	APBD
128	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	2.961.590.000	APBD
129	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	120.000.000	APBD
130	Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	475.000.000	APBD
131	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	60.000.000	APBD
132	Penyuluhan Pertanian	Rp	9.650.882.000	APBD
133	Perekonomian dan Pembangunan	Rp	975.000.000	APBD
134	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	3.559.205.387	APBD
135	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	10.000.000	APBD
136	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	20.000.000	APBD
137	Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	906.695.786	APBD
138	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	40.000.000	APBD
139	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			APBD
140	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	28.151.800	APBD
141	Perizinan Usaha Pertanian	Rp	35.000.000	APBD
142	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	519.390.000	APBD
143	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	48.000.000	APBD
144	Perlindungan Khusus Anak	Rp	930.524.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
145	Perlindungan Perempuan	Rp	333.476.000	APBD
146	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	752.046.000	APBD
147	Promosi Penanaman Modal	Rp	273.000.000	APBD
148	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp	60.000.000	APBD
149	Rehabilitasi Sosial	Rp	8.058.120.000	APBD
150	Riset dan Inovasi Daerah	Rp	198.000.000	APBD
151	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	400.000.000	APBD
152	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	30.000.000	APBD
153	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	425.071.500	APBD

Palembang, 21 Januari 2026

Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru